SHS
2025

PERBUP SEMARANG NO.13, BD 2025/NO.13, 6 HLM
PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN

ABSTRAK

- Belanja daerah harus dilaksanakan secara transparan, efisien dan akuntabel agar terwujud tata kelola keuangan daerah yang baik dengan mendasarkan pada nilai keadilan, kepatutan dan rasionalitas. Untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik sebagaimana dimaksud tersebut, perlu menetapkan standar harga satuan sebagai acuan perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, standar harga satuan dan analisis standar belanja ditetapkan oleh Bupati.
- Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No.67 Tahun 1958; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang penetapan standar harga satuan disusun berdasarkan usulan SKPD dan survei harga pasar. SHS terdiri atas SHS barang dan/atau SHS jasa yang setiap tahun anggaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

CATATAN

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Juni 2025.
- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Semarang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Tahun 2025 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Tahun 2025, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya tahun anggaran 2025.